

Nomor : 06/BT-P3I/III/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Bimbingan Teknis Penyusunan Prosedur Operasional
Standar Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum**

Jakarta, 11 Maret 2016

Kepada Yth,
**Pengelola Pengadaan
(PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja ULP**
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Tata kelola pengadaan dalam regulasi pengadaan barang jasa pemerintah, masih dirasakan kurang responsif terhadap institusi pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan yang semakin meningkat. Pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan Badan Layanan Umum rumah sakit pemerintah, merupakan sebuah terobosan dalam rangka menjawab kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin dinamis

Akan tetapi terdapat tantangan yang besar sekaligus peluang perbaikan pengadaan yang luas, dikarenakan mayoritas BLU yang saat ini ada, masih mengandalkan proses pengadaannya, hanya kepada pengaturan jenjang nilai semata. Semangat fleksibilitas yang ada belum akan berhasil optimal. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) berusaha menjembatani gap pemahaman pengadaan Badan Layanan Umum terhadap regulasi yang berlaku, dengan mengadakan **Bimbingan Teknis Penyusunan Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum** yang dilaksanakan di Jakarta pada periode April - Juli 2016 dengan agenda sebagai berikut :

TEMPAT KEGIATAN	APRIL	MEI	JUNI	JULI
HOTEL MERCURE KOTA- JAKARTA Jl. Hayam Wuruk No. 123	3 - 4	1 - 2	3 - 4	1 - 2

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini. Untuk menambah referensi program, bersama ini kami lampirkan TOR dan jadwal acara. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Rahfan Mokoginta HP. 0852 9899 9383.**

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Pusat Pengkajian **Pengadaan** Indonesia



Khalid Mustafa
Ketua Umum

BIMBINGAN TEKNIS

Penyusunan Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum

Pengadaan barang jasa merupakan rangkaian tata kelola yang sistematis dalam rangka memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi. Tata kelola pengadaan dalam regulasi pengadaan barang jasa pemerintah, masih dirasakan kurang responsif terhadap institusi pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan yang semakin meningkat. Sebagai contoh di RS atau Puskesmas yang sudah menganut Pola Keuangan BLU. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin masif dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, maka hampir didapati bahwa semua Rumah Sakit Rujukan mengalami kenaikan jumlah pasien secara signifikan. Peningkatan pasien secara otomatis akan berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan baku pelayanan.

Pola penganggaran dengan menggunakan mekanisme APBN atau APBD terbatas dalam waktu dan alokasi, dan hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menjawab tantangan pelayanan tersebut. Keterbatasan tersebut telah diantisipasi oleh segenap pemangku kepentingan di dalam UU Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa :

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”

Pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan rumah sakit pemerintah, merupakan hal yang patut ditempuh dalam rangka menjawab kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin dinamis. Entitas BLU merupakan sebuah pendekatan semi bisnis dengan mengedepankan fleksibilitas tata kelola keuangan. Sejalan dengan fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang jasanya, maka perlu sinkronisasi dengan tata kelola pengadaan yang telah dikenal baik dalam praktek bisnis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 dijelaskan bahwa :P3I

“Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.” (pasal 20 ayat 1).

Penjelasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

“BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.”

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut, ada baiknya dalam pengadaan di rumah sakit yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, memperhatikan Supply Positioning Model dari berbagai barang jasa

Tujuan :

Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami:

- Memahami peraturan perundang undangan yang melingkupi dalam pengelolaan BLU
- Memahami secara detil peraturan pengadaan yang diterapkan dalam pengadaan di lingkungan BLU
- Memahami konsep pengadaan barang jasa sesuai dengan kebutuhan belanja BLU
- Memetakan dan memilah berbagai kebutuhan barang dan jasa dalam pelayanan BLU sesuai dengan model persepsi penyedia
- Menyusun draft peraturan jenjang nilai dalam pengadaan barang jasa BLU
- Menyusun draft Prosedur Operasional Standar (SOP) pengadaan barang jasa BLU

Sasaran Audiens/Peserta Aktif :

1. Direktur/Wakil Direktur RS/Pemangku kepentingan pelayanan
2. Pelaksana Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Pengadaan)
3. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat
4. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan langsung barang/jasa pemerintah.

Target Pelatihan :

1. Peserta mampu melakukan pemetaan belanja barang jasa di lingkungan BLU
2. Peserta mampu menyusun substansi/draft Peraturan Pengadaan Barang Jasa dan Prosedur Operasional Pengadaan Barang Jasa di BLU

JADWAL
BIMBINGAN TEKNIS
Penyusunan Prosedur Operasional Standar
Pengadaan Barang Jasa di Badan Layanan Umum

HARI PERTAMA

- 08.00 – 08.30** : Registrasi peserta
- 08.30 – 09.00** : Pembukaan Bimbingan Teknis dan Sambutan/Pengarahan
- 09.00 – 10.15** : Sekilas Badan Layanan Umum
- 10.15 – 12.00** : Peraturan Perundang undangan terkait Badan Layanan Umum
- 12.00 – 13.30** : Ishoma
- 13.30 – 15.15** : Penyusunan Draft Regulasi Pengadaan Badan Layanan Umum (dengan simulasi) Penentuan Plafon Jenjang Nilai Pengadaan
- 15.15 – 15.30** : Coffee Break
- 15.30 – 17.00** : Penentuan Plafon Jenjang Nilai Pengadaan (Lanjutan)
- Narasumber** : **Dr. Ibrahim SH.,MH.,LLM**
Legal Specialist

HARI KEDUA

- 08.30 – 10.00** : Model Persepsi Penyedia di Pengadaan Badan Layanan Umum
- 10.00 – 10.15** : Coffee Break
- 10.15 – 12.00** : Lanjut Model Persepsi Penyedia di Pengadaan Badan Layanan Umum
- 12.00 – 13.00** : Ishoma
- 13.00 – 14.45** : Penyusunan Draft Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang Jasa BLU
- 14.45 – 15.00** : Coffee Break
- 15.00 – 17.00** : Penyusunan Draft Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang Jasa BLU (lanjutan)
- Narasumber** : **Atas Yuda Kandita**
Procurement Specialist

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

Pendaftaran dapat di email : rahfan@pengadaan.org atau SMS HP. 0852 9899 9383

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi :
Telp. Kantor/Fax :
No. Hand Phone : Tanggal Kegiatan diikuti :

PESERTA 1

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi :
Telp. Kantor/Fax :
No. Hand Phone : Tanggal Kegiatan diikuti :

PESERTA 2

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi :
Telp. Kantor/Fax :
No. Hand Phone : Tanggal Kegiatan diikuti :

PESERTA 3

*Formulir dapat copy sesuai jumlah peserta

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

- @Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Dengan Akomodasi 1 kamar untuk 2 peserta/twin share)
- @Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Ribu Rupiah)
Tidak Termasuk Akomodasi

FASILITAS PESERTA

- Buku perpres konsolidasi No.54 tahun 2010 beserta perubahannya
- Standar Dokumen Tender Pemerintah (softcopy).
- Modul dan Materi Slide (lengkap dengan CD) , Sertifikat Pelatihan.
- Tas , dan Alat Tulis.
- Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.
- Video Sosialisasi dan Konsultasi Gratis dengan Narasumber.

PEMBAYARAN

- Tunai saat registrasi

Pendaftaran Hubungi Rahfan Mokoginta HP. 0852 9899 9383